

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(2012-2017)**

Oleh :

Laksmi Hayu Kinasih
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email :

laksmihayu@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the Effects of Fiscal Decentralization and Capital Expenditures on the Financial Performance of Regency/ City Governments in the Special Region of Yogyakarta in 2012-2017. The subjects in this study were regency/ city local governments in Special Region of Yogyakarta which included four regencies and one city. The study used secondary data that can be accessed on the website of the Directorate General of Financial Balance of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia which is published annually. This study uses the convenient sampling method, the data categorized as pulled data or a combination of time series data and cross-section data with multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that local revenue (PAD) has a positive effect on the financial performance of regency/ city governments in the Special Province of Yogyakarta. However, the intergovernmental revenue variable in this study has a negative effect on the financial performance of the regency/ city governments in the Special Province of Yogyakarta. The capital expenditure shows a negative effect on the financial performance of the regency/city governments in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: Local Revenue, Intergovernmental Revenue, Capital Expenditures, and Local Government Financial Performance.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi adalah salah satu proses yang amat penting dalam pelaksanaan demokrasi di dalam suatu negara (Mimba, 2007). Desentralisasi juga dapat diwujudkan sebagai proses pelimpahan wewenang atas perkara politik, fiskal dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Moisiu, 2013). Desentralisasi juga merupakan tindakan pemerintah untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab kepada lembaga yang lebih rendah dalam hierarki politik, administratif, dan spasial (Albehadili dan Hai, 2018).

Transfer kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah daerah ini memiliki fungsi untuk meningkatkan stabilitas sistem demokrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menstimulasi pembentukan basis pengembangan ekonomi daerah dan nasional, meningkatkan transparansi pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Moisiu, 2013). Terdapat tiga dimensi desentralisasi, diantaranya desentralisasi fiskal, desentralisasi politik dan desentralisasi administratif yang diterapkan pada berbagai struktur pemerintah (Vazquez *et al*, 2015).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri dimulai sejak 1 Januari 2001. Kebijakan ini memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mencari potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan melakukan alokasi secara mandiri untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat lebih meratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing.

Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang maksimal apabila ditunjang dengan kemampuan finansial daerah otonom yang memadai. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menggunakan dana dari; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah serta lain-lain penerimaan yang sah.

Belanja modal dapat didefinisikan sebagai belanja pemerintah dimana manfaat yang didapatkan lebih dari satu tahun anggaran serta dapat menambah kekayaan daerah atau aset, namun akan menambah belanja rutin, contohnya seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal merupakan bukti dari banyaknya sarana maupun infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah (Andirfa, 2016). Dengan banyaknya belanja modal, tentu semakin banyak pembangunan yang dilakukan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Mulyani dkk, 2017). Besarnya belanja modal yang harus dikeluarkan oleh

pemerintah daerah hendaknya harus bersumber pada jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya, maka pemerintah daerah hendaknya dapat menggali potensi daerahnya yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah (Nugroho dkk, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2009) yang meneliti peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/ kota di propinsi Jawa Tengah, desentralisasi fiskal seharusnya dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik (Moisiu, 2013). Namun disisi lain desentralisasi fiskal juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan yaitu meningkatkan korupsi. Telah banyak kasus korupsi yang justru dilakukan oleh aparat pemerintahan mulai dari gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD hingga pejabat berwenang telah membuat citra buruk desentralisasi ditengah harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang memadai (Maulani, 2010).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Indonesia yaitu objek penelitiannya. Belum ada peneliti yang menjadikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta ini merupakan salah satu dari lima provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaannya dengan daerah lain yaitu pemberian dana otonomi khusus (otsus), khusus untuk provinsi DIY sendiri dana otsus ini disebut sebagai dana keistimewaan yang termasuk dalam dana perimbangan. Sejak tahun 2013 hingga 2017 jumlah dana keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini terus meningkat, namun menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kinerja keuangan provinsi DIY ini setiap tahunnya malah semakin menurun.

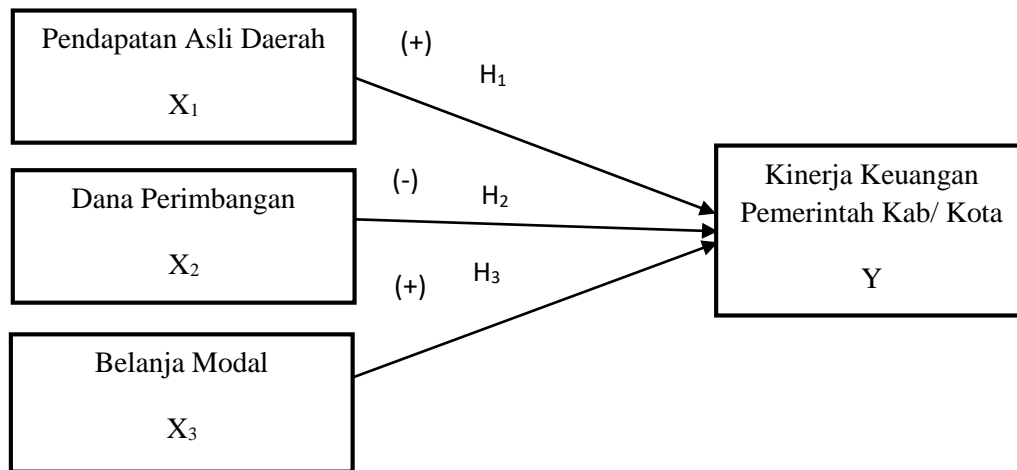
Seharusnya dengan mempertimbangkan keunggulan desentralisasi, kesejahteraan daerah-daerah dengan otonomi khusus ini akan lebih baik (Habibi, 2015). Dengan disahkannya UU Keistimewaan DIY ini pemerintah diharapkan dapat memberikan hak masyarakat untuk hidup lebih sejahtera (Sakir, 2015). Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan; (1) mengetahui pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di propinsi DIY 5 tahun setelah ditetapkannya UU No 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY; (2) mengetahui kabupaten/ kota mana yang kondisi perekonomiannya masih tertinggal. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul; “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017”.

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

MODEL PENELITIAN



OBJEK PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2012-2017. Data yang akan digunakan diperoleh dari Data Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah yang bisa diakses di internet pada laman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau www.djpk.kemenkeu.go.id.

JENIS DATA

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Selain itu data yang digunakan adalah data sekunder, peneliti hanya mengolah data yang sudah ada sebelumnya. Biasanya data yang diperoleh berasal dari tangan kedua. Dapat melalui responden

maupun instansi yang berkewenangan untuk mengumpulkan data tersebut guna penelitian.

TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik *convenient sampling* dengan mencari kepustakaan maupun *searching* di internet di laman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah atau www.djpk.kemenkeu.go.id.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan data populasi, yaitu seluruh Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan sensus data sekunder *time series* dari tahun 2012-2017 dari Laporan APBD Kabupaten/Kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan *data cross section* yang terdiri atas 5 kabupaten/kota, sehingga merupakan *pooled the data* yaitu gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*.

PENGUKURAN VARIABEL

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kinerja

pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kinerja pemerintah daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah selama satu periode dan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator pengukurannya adalah analisis rasio APBD dengan membandingkan satu periode dengan periode sebelumnya maka akan terlihat kecenderungannya. Untuk mengukur variabel ini menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF). Rasio derajat desentralisasi fiskal ini dapat menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah (Supriadi dkk, 2013).

Adapun untuk mengukur variabel ini menurut Reksohadiprojo (2001) dapat menggunakan rumus rasio derajat desentralisasi fiskal di bawah sebagai berikut;

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal.

a. Pendapatan asli daerah

PAD atau pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Indikator pengukuran dari PAD yaitu melalui pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, serta penerimaan lain yang sah bukan dari pajak maupun retribusi. Adapun rumus

yang digunakan untuk mengukur variabel ini dikemukakan oleh Antari (2018) adalah sebagai berikut;

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Laba BUMD)} + \text{Laba PAD yang Sah}$$

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah. Dana perimbangan ini sebelumnya telah di alokasikan oleh pemerintah pusat dalam APBN setiap satu periode anggaran. Indikator untuk mengukur variabel ini menurut Malendra (2016) adalah;

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah penambahan aset tetap/inventaris dengan melakukan pembelanjaan agar dapat menambah manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang mencakup biaya pemeliharaan aset. Menurut Mulyani, dkk (2017) untuk menentukan variabel ini dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan}$$

UJI ASUMSI KLASIK

1. Hasil Normalitas Data

Menurut Ghozali (2005) tujuan pengujian normalitas data ini adalah untuk menguji model regresi variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya terdistribusi secara normal atau tidak normal. Uji normalitas ini dapat dilihat dari analisis statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan tingkat signifikansi harus lebih dari *p-value* 0,05 atau 5%.

2. Hasil Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui model regresi adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dari nilai *Tolerance Variance Inflation* (VIF) Ghozali (2005). Nilai *cut off* yang biasa dipakai dalam uji multikolinieritas harus diatas 0,1 dan nilai VIF harus dibawah 10.

3. Hasil Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji heteroskedastitas dilakukan dengan uji *glejser*. Menurut Nazaruddin dan Basuki (2015) uji *glejser* ini meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen dan probabilitas signifikansinya harus diatas 0,05 atau 5%. Jika hasil uji *glejser* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak terkena heteroskedastisitas.

4. Hasil Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji suatu model regresi atas ada atau tidaknya korelasi antara residual t dengan residual $t-1$ atau periode sebelumnya. Jika dalam uji autokorelasi ditemukan adanya observasi yang berkaitan maka harus dilihat dengan uji *Durbin-Watson* (Ghozali, 2005).

UJI HIPOTESIS DAN ANALISA DATA

Persamaan regresi linier berganda menurut Mawarni (2013) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_XX + \rho_Y\epsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja keuangan pemerintah daerah

a : Konstanta regresi

b : Koefisien regresi

X₁ : pendapatan asli daerah

X₂ : dana perimbangan

X₃ : belanja modal

ϵ : variabel lain yang mempengaruhi

Arti koefisien b adalah apabila nilai b positif (+), hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas akan memberikan dampak peningkatan pada variabel tersebut.

Sedangkan apabila nilai b negatif (-), menunjukkan dampak penurunan pada variabel terkait.

Pengujian hipotesis ini memiliki tujuan untuk memprediksikan dan menguji seberapa besar kekuatan dari pengaruh variabel independen terhadap dependennya.

1. Analisis Regresi Berganda

Uji analisis regresi berganda adalah studi yang digunakan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan variabel independen yang telah diketahui (Ghozali, 2011). Berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi yang ada $>0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen dan hipotesis ditolak.
- b. Nilai signifikansi yang ada $<0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen dan hipotesis diterima.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013) Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila nilai R^2 mendekati 0 maka kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila R^2 mendekati 1 maka variabel independen dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi dalam variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Berganda

No	Variabel	Test Value	Sig	B	Hasil
	Konstanta			0.187	
1	Pendapatan Asli Daerah	0.000	< 0.05	0.005	Diterima
2	Dana Perimbangan	0.000	< 0.05	-0.001	Diterima
3	Belanja Modal	0.444	> 0.05	- 0.001	Ditolak

Penelitian ini menguji variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Hipotesis pertama dan kedua yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima. Sedangkan untuk variabel ketiga yaitu belanja modal, ditolak. Adapun untuk penjelasan secara lebih rinci adalah sebagai berikut;

a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi daerah itu sendiri contohnya seperti retribusi daerah, pajak daerah, laba BUMD, serta penerimaan lain-lain yang sah serta bukan bersumber dari pajak atau retribusi. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima maka akan membuat pemerintah daerah memaksimalkan sumber dayanya agar dapat dijadikan sebagai pundi-pundi pendapatan asli daerah yang tentu saja akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antari, dkk (2018), Febriansyah (2013), serta Budianto (2016) juga menerangkan hal yang serupa dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini. Karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan bersih yang berhak diakui oleh pemerintah daerah dan mempunyai kebebasan untuk mengelola pendapatan dari daerahnya sendiri.

Oleh karena itu pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan daerah. Karena pendapatan asli daerah adalah sumber daya milik daerah yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan daerah sehingga diharapkan daerah memiliki kemandirian dalam memperoleh

maupun mengelola pendapatannya. Sehingga semakin besar pendapatan asli daerah akan semakin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

b. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan daerah yang berasal dari APBN dengan tujuan mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh daerah maka menunjukkan tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah masih rendah karena masih bergantung kepada pemerintah pusat dan membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam menggunakan pendapatan.

Dari hasil penelitian, variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis kedua ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malendra (2016), Julitawati, dkk (2012) serta Budianto (2016) bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena, semakin banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mandiri secara finansial.

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka menunjukkan kemandiriannya

rendah. Kemandirian yang rendah menunjukkan kinerja keuangan yang rendah pula.

c. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa penambahan aset tetap dengan melakukan pembelanjaan/pengeluaran yang masa manfaatnya diharapkan lebih dari satu periode akuntansi. Hasil uji parsial dari variabel belanja modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ketiga ini tidak sesuai dengan penelitian dari Andirfa (2016), Nugroho, dkk (2012) dan Mulyani, dkk (2017) yang mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena belanja modal berfungsi untuk mengakuisisi, membeli dan membuat atau membangun suatu aset tetap yang nantinya akan berguna bagi pembangunan daerah dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Jauhar (2016) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dari belanja modal yang merupakan pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah aset tetap yang diharapkan akan meningkatkan pembangunan daerah yang tentu saja mencerminkan kinerja keuangannya. Selain itu kemungkinan bahwa pembelian atau pengadaan aset daerah belum dapat diukur dalam satu periode akuntansi karena aset tersebut merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 pada laporan realisasi APBD.

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.
2. Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.
3. Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran untuk perbaikan penelitian sejenis dimasa yang akan datang;

1. Diharapkan pada penelitian di masa yang akan datang untuk menambah atau mengganti dengan variabel yang lain yang tidak dijadikan variabel dalam penelitian ini seperti belanja pegawai, luas daerah, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

2. Mengganti rasio kinerja keuangan pemerintah daerah dengan variabel lain seperti rasio efisiensi maupun rasio efektivitas.
3. Menambah sumber informasi mengenai pengungkapan laporan realisasi APBD yang *up to date*.
4. Menambah sampel maupun periode penelitian.
5. Penelitian mengenai pengaruh belanja modal seharusnya dapat menggunakan metode *time lack* karena belanja modal pemerintah daerah belum maksimal untuk diukur dalam satu periode akuntansi.

KETERBATASAN PENELITIAN

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jumlah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sedikit, sehingga subjek penelitian ini juga sedikit.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang artinya sudah ada sebelumnya dan tidak bisa dikembangkan menjadi lebih kompleks.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas merujuk pada laporan realisasi APBD yang menggunakan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
4. Pengukuran variabel Y, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah hanya menggunakan rasio kemandirian daerah atau rasio desentralisasi fiskal.

5. Data yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan bukanlah merupakan data fisik sehingga informasi-informasi terkait APBD dirasa masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Febriansyah (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se- Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara*.
- Albehadili, A.F.C., & Hai, L.X. (2018). Impact of Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Meta-Analysis Approach. *International Journal of Management Sciene and Bussiness Administration* Vol 4, Issue 5, Pages 34-43.
- Alfarisi, Salman. (2015) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang. Jurnal. Universitas Negeri Padang
- Andirfa, Mulia., Basri, Hasan., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota di Propinsi Aceh. Jurnal. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Antari, Ni Putu G S (2018). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Unud, Vol 7. No. 2*
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah.
- Bartle, J.R., Kriz, KA., & Morozov, B. (2011). Local Government Revenue Structure. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 23 (2) 268-287.
- Bastian, Indra. (2001) Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Budianto & Alexander S.W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol.4 No.4*
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. 16: 49-64

- Ebel, Robert., & Yilmaz, Serdar. (2004). *Globalization and Localization: Decentralization Trends and Outcomes*. Intergovernmental Relations & Local Financial Management World Bank 2004.
- Febriansyah, A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se- Sumatera Bagian Selatan.
- Fontanella, A. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibi, Muhammad. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Th. 28, No.2.
- Inyang, B (2014). Contending Issue in The Management of the Intergovernmental Relations in The Nigeria Federal Administration System. *Mediterranean Journal of Social Science*. 4 (3). 226-233.
- Jauhar, Fauzan (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.
- Julitawati, Darwanis, dan Jalaludin (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Propinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol 1. No 1. Hal 1-12.
- Liu, C.H (2007). What Type of Fiscal Decentralization System has Better Performance. *School of Public Policy*.
- Malendra, T.F., Meihendri., & Yunilma (2016). Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Ejurnal Universitas Bung Hatta* Vol 9 No 1.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Maulani, A. (2010, November 25). Korupsi dan Wajah Kusam Otonomi Daerah. *Koran Tempo*.

- Mawarni (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten/ Kota di Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 80-90.
- Mawarni, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol2 No2 Hal 80-90.
- Mimba, N.S.H., Helden, G.J.V & Tillema, Sandra. (2007). Public Sector Performance Measurement in Developing Countries. *Journal of Accounting and Organizational Change* Vol3. No3p.192-198.
- Moisiu, N. (2007). Decentralization and The Increased Autonomy in Local Government. *Procedia Social and Behavioral Science*.
- Mulyani, Sri., & Wibowo, Hardianto. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *KOMPARTEMEN*, Vol XV No 1 hal 57-66.
- Mulyati, Sri. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1. No 2. Hal 211-220.
- Nazaruddin, Itje dan Basuki, AT. (2015). Analisis Statistik dengan SPSS. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nugroho, Fajar., & Rohman, Abdul. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 1 No 2 Hal 1-14.
- Pratolo, Suryo., dan Jatmiko, Bambang. (2017). Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Reksohadiprodo, Sukanto. (2001) *Ekonomika Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Pasal 27 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sakir. (2015). Kebijakan Dana Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Vol 2, No 3*.
- Sasana H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/ Kota Propinsi Jawa tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supriadi., Armandelis., & Rahadi, Slamet. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No. 1 Hal 1-10.
- Suprianto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Propinsi Gorontalo. *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*.
- Vazquez, J.M., Penaz, S.L., & Sacchi, A. (2015). The Impact of Fiscal Decentralization. *GEN Working Paper A -2015*.
- World Bank (1994). Governance: The World Bank's Experience
- Yuguda, M.A. (2014). Effect of Fiscal Decentralization and Revenue Allocation on Local Government Performance: The Nigerian Experience. *JGD* Vol. 10 page 55-68.

